

EKSISTENSI KAMPUNG SIAGA BENCANA (KSB) TUNAS BANGSA DALAM PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM

EXISTENCE OF DISASTER ALERT VILLAGE (KSB) TUNAS NATION IN DISASTERING NATURAL DISASTER VICTIMS

Sunit Agus Tri Cahyono

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI
Jl. Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu Yogyakarta, Indonesia Telp (0274) 377265

E-mail: sunit_atc62@yahoo.com HP.081215173663

Naskah diterima 14 September 2019, direvisi 8 Oktober 2019, disetujui 4 November 2019

Abstract

This research aims to describe the existence of KSB Tunas Bangsa in overcoming victims of natural disasters in Garut Regency. This type of research is descriptive, targeting 53 subjects from the Disaster Alert Village (KSB). The object of research includes the characteristics of members of the KSB, the ability of the KSB in managing logistics; and the ability of the KSB in disaster victims management. Data collection techniques for interviewing, observing, and studying documents. Data and information were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that KSB Tunas Bangsa had sufficient ability both in managing logistics and in dealing with victims of natural disasters, although there were problems relating to proper storage of logistics, provision of logistics, and the lack of Education and training (Diklat) for the KSB Tunas Bangsa vagi disasters. One of the recommendations proposed is the need for KSB to have disaster management facilities and infrastructure such as social barns and social substations that function as a place to collect basic goods needed by disaster victims, both in the form of consumer goods and non-consumption logistics goods. Likewise, technical assistance needs to be held about managing KSB logistics.

Keywords: Existence; Disaster Preparedness Village (KSB, Disaster Victim Management

Abstrak

Riset ini bertujuan mendeskripsikan eksistensi KSB Tunas Bangsa dalam penanggulangan korban bencana alam di Kabupaten Garut. Tipe penelitian deskriptif, dengan sasaran subjek 53 orang anggota Kampung Siaga Bencana (KSB). Objek penelitian mencakup karakteristik anggota KSB, Kemampuan KSB dalam mengelola logistic; dan kemampuan KSB dalam penanggulangan korban bencana. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data dan informasi dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa KSB Tunas Bangsa memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengelola logistic dan dalam menangani korban bencana alam, meskipun ada masalah yang berkaitan dengan tepat penyimpanan logistic, penyediaan logistic, dan minimnya Pendidikan dan pelatihan(Diklat) kebencanaan bagi KSB Tunas Bangsa. Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah perlunya KSB memiliki sarana dan prasarana penanggulangan bencana seperti lumbung sosial dan gardu social yang berfungsi sebagai tempat penampungan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan korban bencana, baik yang berupa barang konsumsi maupun barang logistic non konsumsi. Demikian juga perlu diselenggarakan bimtek tentang pengelolaan logistic KSB.

Kata Kunci: Eksistensi; Kampung Siaga Bencana (KSB), Penanggulangan Korban Bencana

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya memiliki kekayaan alam luar biasa ragamnya yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hasil laut, kehutanan, pertambangan, dan energi, serta ditunjang tanah indah nan elok. Tidak mengherankan Indonesia digambarkan bak negeri *zamrud di Katulistiwa, gemah ripah loh jinawi.*

Begitu melimpahnya keanekaragaman kekayaan hayati di laut dan darat, menggambarkan negeri yang jauh dari bencana alam, seakan negeri yang bebas dari bencana (*free from disasters*). Apalagi ditambah kekayaan aneka ragam budaya Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain di dunia. Kekayaan budaya yang menyatu dan harmonis dalam bentuk tata nilai adat istiadat kehidupan sehingga membentuk keselarasan dan kearifan hidup masyarakat lokal dengan lingkungan. Tata nilai kehidupan yang “bersahabat” dan menyatu dengan lingkungan hasil dari warisan nenek yang telah diturunkan dari generasi ke generasi tersebut disebut sebagai kearifan local. Kearifan local (*local wisdom*) bagi masyarakat setempat menjadi pengetahuan tradisional yang arif dan bijaksana, termasuk bagaimana nilai-nilai keswadayaan yang terbangun dari nilai kearifan local tersebut dapat dimanfaatkan untuk aktivitas mengelola lingkungan alam sehingga dapat digunakan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya bencana alam.

Berdasarkan fakta historis, dibalik keindahan dan kekayaan yang dapat menyejahterakan masyarakat tersembunyi potensi lain yang tidak kalah menariknya, yaitu munculnya potensi ancaman bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, badai angin dan jenis bencana lain. Beberapa sebab terjadinya terjadinya bencana alam antara lain kondisi geografis Indonesia yang terletak di wilayah pertemuan lempeng tektonik dan jalur lingkaran bencana, perubahan iklim global, geologis, demografis, dan juga karena ulah manusia (*social disease*) yang melupakan keseimbangan alam seperti adanya *illegal logging*. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 87 persen wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Ada sekitar 383 kabupaten/kota dari 440 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang berpotensi tinggi sebagai daerah rawan bencana alam. Sebagai bukti sampai bulan November tahun 2016 saja telah terjadi 1.985 kali peristiwa bencana alam di seluruh wilayah Indonesia (BNPB, 2017). Lebih dari 60 persen terjadi di Pulau Jawa dengan kerawanan bencana masing-masing provinsi¹.

¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2016). *Ada 1.985 Kejadian, 2016 Tahun Bencana Bencana*.

Memperhatikan jumlah kejadian bencana tersebut merupakan rekor tertinggi yang pernah terjadi sejak 10 tahun terakhir, sehingga tahun 2016 ditetapkan sebagai tahun bencana. Lebih memprihatinkan hampir setiap tahun bencana alam silih berganti mendera di banyak daerah di tanah air sehingga ada sejumlah pihak yang menyebutnya Indonesia sebagai negeri 1001 bencana.

Rentetan fenomena empirik kejadian bencana alam lain diantaranya gempabumi di Kabupaten Bantul DIY 27 Mei tahun 2006, Padang Sumatera Barat 30 September tahun 2009, Pidei Jaya NAD dan Dompus NTB pada akhir tahun 2016. Tsunami yang melanda NAD dan Sumatera Utara 26 Desember 2004 yang memporak porandakan Aceh, dan di Mentawai 25 Oktober tahun 2010. Bujur di DKI tanggal 1 hingga 2 Pebruari tahun 2007, dan di Wasior Papua Barat 4 Oktober tahun 2007. Di Sumedang, Garut Jawa Barat, dan Kota Bima pada tahun 2016, bencana angin topan di Kabupaten Jember pada Januari 2017, dan tanah longsor di berbagai daerah telah memberikan dampak yang sangat luas bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Ibarat pisau bermata dua, dua potensi yang saling berhadapan di Indonesia antara kemakmuran dan bencana melahirkan istilah yang disebut *Paradox of Plenty* atau paradoks potensi alam Indonesia. Yaitu antara potensi sumber daya alam dengan potensi bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Di satu sisi, melimpahnya kekayaan alam yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai modal mengentaskan masalah kemiskinan, di sisi lain mengandung potensi bencana alam sebagai resiko yang harus dihadapi dan diatasi oleh masyarakat bersama pemerintah.

Bencana merupakan suatu situasi yang kedatangannya sulit terduga sebelumnya yang mendatangkan berbagai kerusakan, kerugian, dan kematian yang *ending*-nya adalah penderitaan bagi manusia. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Disebabkan baik oleh factor alam,

Regional.liiputan6.com. 13 November 2016.

factor non alam, dan faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis². Bencana alam memberi dampak yang sangat luas bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak bencana. Dampak yang ditimbulkan bencana alam bersifat destruktif, merugikan, dan memerlukan pemulihan waktu yang relatif tidak singkat. Akibat bencana alam selalu menimbulkan dampak berantai baik dampak psikologis, sosial, ekonomi, fisik, ekonomi, dan dampak lain. Dampak psikologis diantaranya munculnya perasaan sedih, cemas, dan tidak berdaya akan masa depan, sehingga dapat menimbulkan gejala depresi. Dampak sosial mengakibatkan adanya perubahan kebiasaan karena kehilangan pekerjaan, harta benda, kehilangan atau perpisahan dengan anggota keluarga. dampak fisik dan ekonomi diantaranya dapat dilihat dari luka-luka, kematian, hancurnya tempat tinggal, dan rusaknya tempat atau sarana-prasarana publik dan ekonomi. Dampak lain akibat bencana alam antara lain hilangnya sumber daya, timbulnya berbagai penyakit, dan terganggunya pelaksanaan program pembangunan di daerah bencana (Sunit Agus Tri Cahyono 2011: 25-27).³

Berkait korban jiwa, ESCAP-PBB mendata sedikitnya terdapat 191.164 jiwa yang tewas akibat bencana alam di Indonesia selama 1980-2009. Laporan itu juga merilisi bahwa kerugian akibat bencana alam diperparah oleh kemiskinan⁴. Sebagai perbandingan dampak yang ditimbulkan bencana alam selama tahun 2016 adalah 375 orang tewas, 383 jiwa luka-luka, 2,52 juta jiwa menderita dan mengungsi, dan lebih 34 ribu rumah rusak. Tingkat kerentanan lebih besar diderita oleh

warga miskin dan yal ini berasal dari ketimpangan sosial-ekonomi dan lingkungan alam.

Belajar dari pengalaman panjang masyarakat local bagaimana menghadapi kejadian bencana alam yang bertubi-tubi, antisipasi, adaptasi, tindakan dan kendala menghadapi, maka pemerintah, khususnya Kementerian Sosial RI telah melakukan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dengan menempatkan kemandirian masyarakat local sebagai kesatuan aktif yang memiliki kemampuan dan keterampilan merespon bencana. Kearifan local yang berisi pengetahuan local dinamis yang sudah menyatu dengan pengalaman panjang, sistem nilai, kebiasaan dan budaya setempat, menjadi peluang yang tepat bagi Kementerian Sosial untuk mengambil kebijakan pada level local. Caranya adalah mengintegrasikan semangat kemandirian, keswadayaan, dan memperkuat partisipasi masyarakat local dalam proses kegiatan penanggulangan bencana alam dengan memfasilitasi perencanaan pendekatan program yang sesuai kebutuhan lokalitas ke dalam suatu wadah yang disebut Kampung Siaga Bencana (KSB).

Kearifan local berkait dengan alam merupakan suatu bentuk kearifan perilaku hidup masyarakat di suatu daerah tertentu dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup. setiap daerah memiki kearifan local spesifik, sehingga antara daerah satu dengan daerah lain berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh kebutuhan, masalah dan tantangan hidup yang berbeda-beda sehingga melahirkan berbagai pengalaman perilaku yang berbeda dan dinamis berkait dengan lingkungan sosial maupun alam sejalan dengan berubahnya waktu, dan tatanan sosial budaya yang ada di masyarakat, termasuk dalam beradaptasi dengan lingkungan atau menghadapi tatangan bencana alam. Pengetahuan dan pengalaman mereka bersama lingkungan setempat yang telah diwariskan turun-temurun dijadikan pedoman yang akurat dan modal sosial dalam mengembangkan lingkungan dan menjadi basis utama solusi apabila terjadi ketidakseimbangan lingkungan alam seperti kejadian bencana alam.

2 Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro. (2010). *Manajemen Bencana Respons dan Tindakan terhadap Bencana*. Yogyakarta: MedPress

3 Sunit Agus Tri Cahyono. (2011). *Kajian Faktor Penyebab dan Dampak Sosial Bencana Banjir Wasior*. Yogyakarta: B2P3KS Press

4 Laporan «*The Asia Pacific Disaster Report 2010*» yang disusun oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk kawasan Asia dan Pasifik (ESCAP) dan Badan PBB Urusan Strategi Internasional untuk Penanggulangan Bencana (UNISDR). Dipublikasikan Selasa, 26 Oktober 2010, ini merupakan kali pertama PBB menyusun laporan khusus mengenai bencana alam di Asia-Pasifik. <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/185603-korban-di-ri-terbanyak-kedua-di-asia-pasifik> 29 Oktober 2010

Atau musibah kebakaran dapat menghindarkan jatuhnya korban lebih banyak.

Mengacu pada kearifan local yang dimiliki oleh setiap daerah, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial telah membentuk Kampung Siaga Bencana yang dilaksanakan di setiap tingkat kecamatan atau komunitas adat sederajat khususnya di daerah-daerah rawan bencana. Kampung Siaga bencana dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. *Aktor* yang berperan penting sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dikelompokkan dalam 3 kelompok yakni (1) Pemerintah; (2) Masyarakat; dan (3) Lembaga Usaha. Dalam manajemen Bencana masyarakat adalah basis utama penanggulangan bencana. Dari tiga kelompok tersebut, masyarakat sebagai aktor utama terutama selama proses penyelamatan jika sewaktu waktu terjadi bencana sampai pada tahap pemulihannya. Pada sisi lain masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana adalah pihak yang paling rentan⁵terdampak dan menjadi korban bencana. Oleh karena itu, diperlukan upaya memberdayakan daerah rawan bencana alam dalam wadah Kampung Siaga Bencana (KSB)

Dalam KSB, kesadaran akan bencana dan dampaknya, merupakan komponen penting bagi masyarakat untuk beradaptasi dalam situasi sulit (*resiliensi*) hidup bersama bencana berdasarkan pengalaman dan kearifan lokal. Dalam implementasinya, KSB ini terbentuk melalui Permensos No 128/2011. Dalam hal ini Kementerian Sosial bertindak sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk membentuk organisasi tersebut. Tujuannya adalah memberikan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan resiko bencana. Membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial

⁵ Gunawan. Naskah ini pernah disampaikan dalam Seminar Nasional Penguatan Ketangguhan Berbasis Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim, pada tanggal 30 November 2016 di Pusat Penelitian Geoteknologi Bandung (Kerjasama LIPI dan BNPB).

antar masyarakat. Mengorganisasi masyarakat terlatih siaga bencana. Menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat. Mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana. Dengan demikian KSB dipandang sebagai wadah yang efektif bagi penanggulangan bencana alam berbasis masyarakat di kawasan bencana alam dan pengembangan masyarakat tentang penanganan bencana alam berbasis kearifan lokal. Dalam implementasinya, peran pendampingan Taruna Siaga Bencana (Tagana) beserta unsur pemerintah dan swasta sangat urgen bagi penguatan kapasitas KSB untuk mengelola bencana (*disaster management*)

Berkait dengan hal tersebut perlu dilakukan penelitian tentang *Eksistensi Kampung Siaga Bencana (KSB) Tunas Bangsa dalam Penanggulangan Korban Bencana Alam di Kabupaten Garut*, mulai dari proses pembentukan KSB sampai pada setiap tindakan terhadap bencana. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana keberadaan KSB dalam penanggulangan korban bencana alam? Khususnya kemampuan dalam mengelola logistic dan kemampuan dalam mengevakuasi korban bencana. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan eksistensi KSB Tunas Bangsa dalam penanggulangan korban bencana. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu referensi teoritik dan empiric bagi Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Republik Indonesia dalam penanganan korban bencana alam.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian Eksistensi Kampung Siaga Bencana (KSB) dan dalam Penanggulangan Korban Bencana adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya tentang salah satu gejala atau fenomena yang ada dalam kehidupan masyarakat yang dapat digunakan untuk menelaah suatu keadaan, kelompok, masyarakat setempat, lembaga-lembaga ataupun individu (Soerjono Soekanto, 1990:49). Dalam hal ini adalah eksistensi KSB, dan kearifan lokal dalam penanganan korban bencana alam.

Adapun berkait dengan KSB adalah wilayah rawan bencana tersebut memiliki organisasi KSB⁶ yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat⁷ untuk membantu masyarakat dan meningkatkan kemandirian dalam penanganan korban bencana. KSB dimaksud telah mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari Kementerian Sosial dan/atau pemerintah setempat, serta telah memperoleh pelatihan dan bimbingan teknis dari Tagana.

Mempertimbangkan hal di atas, maka lokasi ditentukan secara purposive di empat kabupaten dan satu kota, yaitu di Kabupaten Malang Jawa Timur. Sumber data diperoleh melalui wawancara tatap muka antara peneliti dengan informan kunci (anggota KSB) dan instansi lain yang dipilih secara purposif terkait dengan penanganan korban bencana, serta observasi yang berhubungan dengan eksistensi KSB dalam penanganan korban bencana di lokasi penelitian secara langsung. Informan ditentukan sebanyak 20 orang.

Adapun teknik penentuan informan KSB terdiri dari unsur Masyarakat, yaitu *pertama*, pengurus (ketua, sekretaris), anggota, Tagana, masyarakat sekitar, yaitu masyarakat sekitar (tokoh/tetua yang mengetahui sejarah kearifan local/sejarah daerah). Kedua, tetua/tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah kearifan local yang tidak masuk anggota KSB. *Ketiga*, korban bencana alam. *Keempat*, Instansi atau badan terkait (OPD) sebagai informan pendukung yang terlibat langsung/tidak langsung dalam penanganan bencana dan korban bencana alam. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan gabungan teknik kualitatif deskriptif. Adapun teknik deskriptif kuantitatif yang lebih mengedepankan perhitungan untuk memperoleh persentase dan distribusi frekuensi atau dikenal

dengan teknik elaborasi. Dengan mengetahui frekuensi dan persentase kategori maka dapat ditangkap makna informasi yang terkemas dalam keseluruhan hasil penelitian.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik KSB Tunas Bangsa Kabupaten Barat

Di Kabupaten Garut, Kampung Siaga Bencana (KSB) Tunas Bangsa di Kecamatan Cisompet, desa Sukanegara adalah KSB terpilih dalam penelitian ini yang beranggotakan 53 orang. Kecamatan Cisompet berjarak 98 km dari Ibu Kota Garut dengan waktu tempuh kurang lebih 5 jam perjalanan dengan kendaraan roda empat. Lamanya karena perjalanan dari Kota Garut menuju Kecamatan Cisompet melalui perbukitan dengan jalan berkelok-kelok. KSB "Tunas Bangsa"

KSB Tunas Bangsa yang berada di desa Sukanegara, Kecamatan Cisompet secara legalitas telah diakui dengan SK kepala Desa Sukanegara No 101/2005/DS/ XII, diakui keberadaannya pada tahun 2011, dan dikukuhkan pada tahun 2012 dengan nomenklatur KSB Tunas Bangsa.

Kampung Siaga Bencana (KSB) yang dikukuhkan tahun 2012 berada di Desa Sukanegara beranggotakan 53 orang (22 orang perempuan dan 31 orang laki-laki). Banyaknya jumlah anggota KSB dengan jenis kelamin laki-laki terjadi seiring dengan banyaknya jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Cisompet. Sebagai organisasi sosial yang berfungsi sebagai penyelesaian masalah korban bencana alam yang terjadi di Kabupaten Garut. Anggota KSB Tunas Bangsa mempunyai tingkat pendidikan yang sangat beragam. Sampai penelitian ini dilakukan KSB Tunas Bangsa belum memiliki gedung yang berfungsi sebagai lumbung sosial dan gardu sosial. Pusat aktivitas keorganisasian masih "nebeng" di Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Cisompet.

Terdapat keragaman tingkat pendidikan anggota KSB Tunas Bangsa. Sebagian terbesar (21 orang atau 38,5%) anggota KSB berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan hanya

6 Sampai tahun 2019, Kementerian Sosial menargetkan kurang lebih 1000 KSB di daerah-daerah rawan bencana tingkat kabupaten/kota, sedangkan pada tahun 2017 menargetkan 100 KSB. Di Indonesia hingga saat ini ada 456 KSB. *Republika.com*. 23 Maret 2017.

7 Pembentukan KSB dimulai dari proses sosialisasi selama lima hari dan bimbingan teknis. Kekuatan KSB ada pada pendampingan Tagana dan Tagana. Setelah sosialisasi Tagana melakukan bimbingan teknis kepada warga KSB sampai ada lumbung sosial di kampung yang fungsinya serupa dengan gudang logistik (*buffer stock*)

8 Mukhtar dan Erna Widodo. (2000). *Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz.

satu orang yang berpendidikan sarjana S1. Hasil penelusuran melalui wawancara tidak terstruktur diketahui bahwa banyaknya anggota KSB dengan pendidikan SLTA terjadi karena, rendahnya minat orangtua untuk memberikan kesempatan bagi anaknya untuk masuk ke jenjang pendidikan tinggi. Mahalnya biaya pendidikan dan keinginan untuk membantu ekonomi keluarga menjadi alasan bagi orangtua untuk tidak memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk masuk ke jenjang pendidikan tinggi.

Mata pencaharian anggota KSB Tunas Bangsa sebagian besar bekerja sebagai ibu rumah tangga dan buruh. Hasil pengumpulan data diketahui bahwa sebagian terbesar (21 orang) anggota KSB dengan pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga. Sebagian terbesar kedua adalah buruh (11 orang atau 19,8%), dan hanya satu orang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini terjadi seiring dengan banyaknya jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian sebagai buruh. Hasil penelusuran lebih lanjut melalui wawancara tidak terstruktur diketahui bahwa mereka yang bekerja sebagai ibu rumah tangga pada saat tanggap darurat bekerja di dapur umum.

Karakteristik umur KSB Tunas Bangsa di Kabupaten Garut sebagian besar berusia produktif. yaitu 24- 51 tahun sejumlah 49 orang atau 92,45 %. Kondisi yang demikian sangat memungkinkan bagi KBS untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam yang terjadi hampir setiap tahun. Namun demikian, usia produktif seseorang tidak serta merta akan menjadikan seseorang menjadi terampil dalam menyelesaikan masalah jika belum disertai dengan latihan yang memadai.

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa belum semua anggota KBS telah mengikuti pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan kejadian bencana di Kabupaten Garut.

Struktur Organisasi KSB Tunas Bangsa. Dalam keanggotaan KSB terdiri dari beberapa unsur ;Unsur TKSK, Tagana,PSM, Karang Taruna, Aparat Desa,Tokoh Masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Hasil wawancara dengan ketua diketahui bahwa unsur yang terdapat dalam keanggotaan KSB sebagian besar didominasi

oleh anggota masyarakat dan tokoh masyarakat. Keanggotaan KSB Tunas Bangsa cukup bervariasi, sebagian terbesar (13 orang) anggota KSB adalah anggota masyarakat terdampak, terbanyak kedua adalah Tagana jumlahnya delapan orang, TKSK satu orang, aparat desa empat orang. TKSK jumlahnya hanya satu orang, hal ini terjadi karena satu kecamatan hanya ada satu orang TKSK. Kondisi yang demikian dapat dimaknai secara positif bahwa partisipasi masyarakat untuk menolong dirinya sendiri cukup bagus. Tagana yang bekerjasama dengan aparat desa dan organisasi sosial kemasyarakatan berusaha untuk memberikan pelayanan dalam penanganan korban bencana alam.

Sebagai organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk masyarakat kepengurusan KSB disusun sebagai berikut: Satu orang ketua, satu orang sekretaris, delapan orang di Dapur Umum, tujuh belas orang di Pertolongan Pertama Pada Gawat Darurat (PPGD), empat belas orang di bidang shelter, enam orang di bidang komunikasi. Kondisi yang demikian dirasa masih kurang memenuhi kebutuhan pelayanan dan penanganan korban bencana. Secara ideal dalam penanganan korban bencana disusun sebagai berikut : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa seksi: a) Tim Reaksi Cepat (TRC) dan komunikasi, b) Tim Evaluasi;c) Tim Logistik d) Tim Dapur Umum e) Tim Shelter d)Tim Pelayanan Sosial e) Tim Kesehatan (PPGD) f) Tim Keamanan g) Tim Sarana. Secara rinci KSB telah menentukan Standart Operasional Prosedur dalam setiap tim.

Hasil wawancara dengan ketua KSB diketahui bahwa secara materi pembagian keanggotaan telah disesuaikan dengan bidang kebutuhan dalam penanganan korban bencana alam. Namun demikian dalam kegiatan sehari-hari belum semua bidang dapat bekerja sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana alam (Pra Bencana, Saat Kejadian Bencana dan Paska Bencana). Artinya sebagian bidang, akan bekerja pada saat terjadinya bencana, sedang untuk pra dan paska masih kurang kegiatan. Berikut penuturan ketua KSB (Jajang); *“Pada saat Pra bencana yang idealnya dilakukan sosialisasi pencegahan kerusakan / penyelamatan jiwa dan harta benda, kami belum dapat melakukan*

secara optimal karena keterbatasan dana". Untuk pencegahan kami masih menggunakan kearifan lokal berupa peringatan untuk mengungsi dengan memukul "pentrungan" Namun saat tanggap darurat kami dapat memberikan pertolongan dengan cepat, dengan menghimpun dana dari masyarakat dan pedagang di pasar". Dari pernyataan tersebut ada beberapa hal yang patut untuk dimaknai yaitu; ketika pra bencana masyarakat masih memanfaatkan kearifan lokal sebagai upaya untuk meminimalisir timbulnya korban yang lebih banyak akibat bencana, makna lain adanya kemampuan anggota KSB dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk ikutserta dalam kegiatan penanganan korban bencana alam cukup baik.

Pembagian Tugas Organisasi Kampung Siaga Bencana. KSB Tunas Bangsa dalam penanganan korban bencana alam terbagi dalam beberapa tim (bidang) yaitu: (1) Tim reaksi cepat yang bertugas pada saat terjadi bencana untuk mengidentifikasi kejadian bencana, kronologis, lokasi bencana, jumlah korban, jenis kerugian dan jenis kebutuhan korban (2) Tim Evakuasi yang bertugas untuk pencarian korban, penanganan pengungsi dan pemantauan perkembangan kejadian bencana (3) Tim Logistik menyediakan keperluan dan kebutuhan korban bencana; berupa peralatan dan bahan konsumsi, serta kebutuhan pengganti prasarana dan sarana umum (4) Tim dapur umum; mengelola stock bahan makanan, dan mengelola peralatan dapur, mengelola konsumsi bahan makanan untuk korban (5) Tim Shelter menyiapkan tempat pengungsian bagi para korban bencana, menjalin komunikasi dengan pihak terkait dalam pemenuhan kebutuhan korban (6) Tim Kesehatan yang bertugas untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan rumah sakit, tenaga medis untuk bersama-sama memberikan pertolongan bagi korban bencana sesuai dengan kebutuhan korban (7) Tim Pelayanan Sosial bertugas menjalin komunikasi dan koordinasi dengan relawan sosial untuk memberikan pelayanan bagi korban bencana terutama untuk pelayanan psiko sosial. Pelayanan psikososial idealnya diberikan secara berkelanjutan. Terutama bagi korban yang mengalami guncangan jiwa (8) Tim sarana dan prasarana yang bertugas

penyediaan sarana penunjang berupa peralatan, sedang prasarana berupa penyediaan dan perbaikan prasarana jalan dan penerangan.

Hasil wawancara dengan ketua KSB diketahui bahwa dari delapan bidang tugas tersebut ada beberapa bidang yang belum dapat bekerja dengan baik, diantaranya adalah bidang logistik. Logistik yang disediakan terkadang menjadi kadaluwarsa karena disimpan terlalu lama. Demikian pula bidang pelayanan kesehatan yang belum memadai, medan bencana yang sulit ditempuh, keterbatasan sarana transportasi, kerusakan jalan dan keterbatasan personil, menjadi hambatan dari tim pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan secara optimal. Menurut aspirasi korban, untuk pelayanan kesehatan idealnya disediakan tenaga medis yang selalu siap sedia di Huntara. Namun hal ini sulit dilakukan, kesulitan ini dikemukakan pula oleh salah satu aparat Dinas Kesehatan pada saat konfirmasi data; *"Kami telah melakukan upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan, namun untuk menyediakan tenaga medis di lokasi Huntara kami belum mampu"* Memperkuat pernyataan tersebut adalah pernyataan korban *"kalau ada yang sakit mendadak kami membawanya dengan tandu dan kain sarung"*.

Peralatan yang Dimiliki KSB Tunas bangsa

Peralatan (Sarana dan prasarana) yang dimiliki KSB Tunas bangsa sebagai berikut.

Tabel 1

Kepemilikan Sarana dan Prasarana KSB Tunas Bangsa

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Tenda keluarga	3 unit
2	Tenda Regu	1 unit
3	Blankar tidur	5 unit
4	Perlengkapan dapur keluarga	Tidak terdata
5	Tikar gulung	10 buah
6	Kabel	100 m
7	Lampu TL	4 buah
8	Pentrungan	10 buah
9	Terpal	4 buah
10	Tambang	50 m

Sumber: hasil wawancara dan telaah dokumen, 2017

Hasil pengamatan langsung diketahui bahwa peralatan tersebut masih tersedia, hanya saja ketersediaan vasilitas tersebut masih kurang

memadai untuk penanganan korban pada saat terjadinya bencana. Selain fasilitas yang berupa barang-barang inventaris, terdapat pula persediaan bahan makanan berupa sembako. Untuk barang inventaris yang tersedia di kantor desa, pada saat terjadinya bencana telah dimanfaatkan secara baik. Namun jumlahnya masih kurang memadai, dapat dicontohkan di sini ketika terjadi bencana banjir bandang pada tanggal 21 September 2016 dengan jumlah pengungsi 177 KK, hanya tersedia 3 unit tenda keluarga dan 5 blankar tidur. Sedang untuk persediaan bahan makanan (sembako) yang sudah tersedia di bufeerstock beberapa bulan sebelum terjadi bencana, pada saat terjadinya bencana sudah kadaluwarsa. Mempertegas kondisi ini ketua KSB menyatakan : *“ Ibu..... bahan makanan yang tersedia sudah tidak layak untuk dimakan karena sudah kadaluwarsa, sehingga untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi kami berusaha dengan mencari donatur di pasar. Kesanggupan dari anggota KSB untuk mencari donatur pemenuhan kebutuhan makan bagi para pengungsi, merupakan indikator eksistensi anggota KSB dalam penanganan korban bencana alam.*

Selain barang-barang inventaris dan persediaan bahan makanan, telah tersedia pula tempat hunian sementara (Huntara). Huntara yang disediakan untuk 177 KK, sudah berusia

satu tahun. Hasil pengamatan langsung di lokasi Huntara diketahui kondisinya sudah mulai rusak. Namun demikian pemerintah daerah sudah mengupayakan relokasi bagi korban bencana alam.

2. Kemampuan KSB Tunas Bangsa dalam Penanggulangan Korban Bencana Alam

Kemampuan KSB Tunas Bangsa dalam Pengelolaan Logistik

Kemampuan pengelolaan logistik atau *bufferstock* dalam kajian ini dimaksudkan sebagai upaya dari anggota KSB untuk mencari, menyimpan dan menyalurkan logistik. Mencari bantuan logistik dilakukan dapat saat pra bencana. Mencari dan menyalurkan bantuan logistik dilakukan pada saat terjadinya bencana, penyimpanan bantuan dilakukan pada saat pra bencana, tanggap darurat maupun paska bencana. Untuk mengetahui tingkat kemampuan dalam pengelolaan logistik ada tiga kategori yaitu : Mampu, Cukup Mampu dan kurang mampu. (1) Mampu jika informan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan logistik, menyalurkan secara tepat sasaran dan menyimpan dengan baik (2) Cukup mampu; jika informan hanya mampu memenuhi dua dari tiga kategori di muka (3) Kurang mampu ; jika hanya mampu melakukan satu dari tiga kategori di muka

Tabel 2
Kemampuan Pengelolaan Logistik

No	Pra Bencana			Tanggap Darurat			Paska Bencana		
	Tingkat kemampuan	Jumlah Informan	%	Tingkat kemampuan	Jumlah Informan	%	Tingkat kemampuan	Jumlah Informan	%
1	Mampu	2 orang	10	Mampu	3 orang	15	Mampu	3 orang	15
2	Cukup mampu	5 orang	25	Cukup mampu	15 orang	75	Cukup mampu	14 orang	70
3	Kurang mampu	13 orang	65	Kurang mampu	2 orang	10	Kurang mampu	3 orang	15
	jumlah	20	100	Jumlah	20	100	Jumlah	20	100

Sumber: hasil wawancara, 2017

Hasil wawancara dengan 20 informan mempunyai kemampuan yang bervariasi dalam setiap kegiatan. Untuk kegiatan pra bencana sebagian besar yaitu 13 orang (65%) informan mengaku kurang mampu dalam mengelola logistik, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas terjadi karena karena tidak semua sifat bencana mendapat bantuan logistik dari pemerintah. Untuk bencana alam yang tidak

bersifat nasional (hanya terjadi di satu wilayah kecamatan), anggota KSB merasa kesulitan untuk perolehan bantuan. Untuk mengatasi hal ini anggota KSB yang bekerjasama dengan SKPD setempat berhasil mengumpulkan bantuan dari masyarakat.

Secara kualitas terjadi karena bantuan yang sudah ada acap kali tersimpan terlalu lama dalam ruang yang kurang memenuhi standart

penyimpanan, ketika sudah mendapat bantuan dari masyarakat dan harus menyimpan di *bufferstock* dengan kondisi ruangan yang belum memenuhi standart penyimpanan yang baik. Barang logistik acap kali disimpan terlalu lama sehingga pada saat harus disalurkan barang tersebut sudah rusak atau kadaluwarsa. Untuk mengatasi hal ini ketua KSB menyatakan : *kami ingin agar logistik yang sudah tersedia dikelola dengan membuka warung, untuk jual beli stock logistik yang tersimpan.*

Pada saat tanggap darurat, selain berusaha untuk mendapatkan bantuan diupayakan juga penyaluran bantuan. Untuk kemampuan tersebut sebagian besar informan yaitu 15 orang (75 persen) menyatakan cukup mampu untuk , mencari bantuan maupun menyalurkan bantuan kepada korban, kendati jarak tempat penyimpanan dengan desa terdampak bencana cukup jauh dan tidak dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat, namun anggota KSB dengan sukacita mengantarkan bantuan tersebut dengan mengendarai motor pribadi.

Seperti halnya pada saat pra bencana, saat pasca bencana, informan yang menyatakan kurang mampu jumlahnya cukup banyak yaitu 15 orang (75 persen). Pada paska bencana logistik yang tersedia selain jumlahnya yang belum dapat dipastikan sesuai dengan jumlah korban bencana, kualitasnya pun acap kali kurang terjamin karena kadaluwarsa. Kemampuan KSB untuk

menghimpun dana dari masyarakat dan menjalin kerja sama dengan instansi terkait, kemudian menyalurkan bantuan dengan meluangkan waktu dengan mengendarai kendaraan pribadi, menjadi indikasi dari eksistensi KSB dalam penanggulangan bencana alam secara lebih khusus untuk penanganan korban bencana secara lebih khusus lagi pada pemenuhan kebutuhan logistik.

Kemampuan KSB Tunas Bangsa dalam Evakuasi Korban Bencana Alam

Seperti diketahui bahwa berdasarkan sistem penanganan bencana terbagi menjadi tiga siklus waktu yaitu , pra bencana, tanggap darurat dan paska bencana. Dalam kejadian bencana alam, ketiga siklus penanganan korban tersebut saling bertautan satu dengan lainnya, saat pra bencana dapat berubah menjadi kondisi tanggap darurat bahkan menjadi paska bencana. Untuk penanganan korban dinyatakan mampu jika memenuhi tujuh kategori berikut: (1) mamahami SOP penanganan korban bencana (2) mampu memberikansosialisasi(3)mampumenyelamatkan korban, (4) menempatkan di shelter dan posko (5) menempatkan dalam huntara, (6) memberi bantuan sesuai kebutuhan (7) memberikan bantuan psiko sosial; dinyatakan cukup mampu jika informan baru mampu melakukan enam dari tujuh kategori di muka dan dinyatakan kurang mampu jika hanya mampu melakukan lima dari tujuh kategori di muka.

Tabel 3
Tingkat Kemampuan Penanganan Korban

No	Pra Bencana			Tanggap Darurat			Paska Bencana		
	Tingkat kemampuan	Jumlah Informan	F	Tingkat kemampuan	Jumlah Informan	F	Tingkat kemampuan	Jumlah Informan	F
1	Mampu	3 orang	15	Mampu	14 orang	70	Mampu	12 orang	60
2	Cukup mampu	5 orang	25	Cukup mampu	4 orang	20	Cukup mampu	6 orang	30
3	Kurang mampu	12 orang	60	Kurang mampu	2 orang	10	Kurang mampu	2 orang	10
	Jumlah	20 orang	100	Jumlah	20 orang		Jumlah	20 orang	100

Sumber: hasil wawancara, 2017

Data di atas menunjukkan bahwa untuk penanganan korban pada saat pra bencana sebagian besar informan (12 orang atau 60 persen) mengaku kurang mampu untuk menangani korban, hal ini terjadi karena informan kurang memahami SOP penanganan korban bencana saat pra bencana. SOP yang disusun oleh KSB

masih sebatas untuk kejadian tanggap darurat bencana. Kendati informan mengaku belum memahami SOP saat pra bencana, bagaimana cara mengamankan diri dan menyelamatkan harta benda, namun dengan kejadian bencana yang berulang-ulang, maka pada saat pra bencana masyarakat mulai memahami tanda-tanda

akan terjadinya bencana dan memanfaatkan kearifan lokal sebagai penanganan korban saat pra bencana. Kearifan lokal yang dimanfaatkan oleh KSB dalam penanganan korban pada saat pra bencana adalah dengan mencermati situasi alam dan musim. Dicontohkan di sini adalah ketika terjadi hujan lebat, maka kemungkinan terjadi banjir dan tanah longsor sangat tinggi. Pemukulan kentongan (kentongan) sebagai tanda akan terjadinya bencana menjadi suatu hal yang sangat diyakini oleh masyarakat bahwa bencana alam akan terjadi. Hanya 3 orang (15 persen) yang mengaku kurang mampu untuk menangani korban saat pra bencana, hal ini terjadi karena pengetahuan mereka tentang SOP penanganan korban bencana masih kurang, disamping rendahnya kemampuan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat.

Pada saat tanggap darurat 14 orang (70 persen) informan mengaku mampu untuk menangani korban. Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi bencana (BPBD dan TKSK) informan yang sudah memahami SOP penanganan korban bencana alam akan segera melakukan evakuasi, menyelamatkan korban dengan menempatkan di shelter pengungsian, kemudian memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan korban. Hanya dua orang (10 persen) yang mengaku kurang mampu menangani korban, hal ini terjadi karena pengetahuan mereka tentang SOP penanganan korban bencana masih kurang, disamping keterbatasan kemampuan mereka untuk mencari informasi tentang jumlah dan keadaan korban yang masih kurang.

Pada saat paska bencana sebagian besar informan (12 orang atau 60 persen) mengaku mampu untuk menangani korban bencana. Hasil wawancara yang kemudian didukung dengan konfirmasi data diketahui bahwa kendati SOP penanganan korban bencana pada saat paska bencana belum tersusun, namun dalam kegiatannya KSB telah melakukan kegiatan untuk penanganan korban, antara lain berupa pendampingan. Hasil pengamatan langsung diketahui bahwa paska bencana, korban telah ditempatkan di hunian sementara (Huntara), dengan jaminan jatah hidup dari pemerintah selama 90 hari dengan nominal Rp 900.000 per

orang dan berakhir pada bulan April, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal se hari-hari. Hasil penelusuran lebih lanjut terhadap korban yang berada di Huntara sudah satu tahun lamanya, dan tidak lagi mendapat bantuan dari pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan korban, informan mengaku telah berusaha untuk memberikan bantuan makanan dengan mencari donatur pada penjual sembako, dan masyarakat sekitar. Disamping itu informan telah menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa SKPD terkait untuk memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan korban, di antaranya lampu penerangan jalan menuju Huntara maupun di Huntara, penyediaan air bersih, perbaikan jalan dan pemenuhan kesehatan.

Untuk pemenuhan kebutuhan psikososial, meski sudah dilaksanakan namun belum optimal. Beberapa hambatan di antaranya keterbatasan SDM, demikian pula dengan pemenuhan pelayanan kesehatan. Kejadian bencana alam tanah longsor di desa Sukanegara menjadi salah satu bukti empirik dari kemampuan KSB dalam penanganan korban bencana alam baik pada pra, tanggap darurat dan paska bencana. Bahkan untuk relokasi korban bencana alam KSB bersama-sama dengan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk relokasi korban bencana alam tanah longsor.

D. SIMPULAN

KSB Tunas Bangsa Kecamatan. Cisompet, Kabupaten Garut mampu mengelola logistik secara baik. Meskipun demikian terdapat sejumlah masalah yang dihadapi. yaitu: *Pertama*, berkait dengan tempat penyimpanan untuk persediaan logistik bagi korban bencana. Bagi KSB, Lumbung Sosial merupakan persyaratan utama karena berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar korban bencana, khususnya pada fase tanggap darurat, seperti disyaratkan dalam Pasal 7 Permensos RI Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana dan Peraturan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Nomor 193 Tahun 2011. KSB Tunas Bangsa Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, masih menggunakan kantor kelurahan sebagai pusat pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian,

serta penyaluran logistik. *Masalah kedua*, berkait dengan penyediaan logistik barang konsumsi untuk korban bencana yang disimpan di gudang penyimpanan sehingga ada sebagian logistik di salah satu KSB menjadi kadaluwarsa. Logistik menjadi kadaluwarsa sebagai akibat proses penyimpanan yang melampau batas waktu pemakaian (waktu layak konsumsi). *Ketiga*, berkait dengan minimnya diklat kebencanaan yang bermateri materi kediklatan pasca bencana yang diterima KSB seperti kelogistikan dan pendampingan social-psikologik bagi korban bencana alam yang mengalami stress atau trauma, bagaimana melakukan pendataan kebutuhan untuk memastikan kebutuhan korban bencana (pengungsi) baik keluarga maupun umum, selanjutnya menyalurkan bantuan dari pemerintah dan donator. Apabila bantuan kurang, bagaimana KSB mengusahakan melalui sumber-sumber daya setempat untuk mencukupi kekurangannya, atau mengajukan bantuan kepada pihak lain (lembaga/ organisasi pemberi bantuan).

Kemampuan menangani korban bencana. Pada saat sebelum bencana semua anggota KSB Tunas Bangsa telah mengetahui dan memahami standar operasional prosedur (SOP) atau langkah-langkah yang harus mereka tempuh untuk melakukan kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi kepada masyarakat sekitar daerah rawan bencana. Pada tanggap darurat (fase saat bencana), mayoritas anggota KSB Tunas Bangsa mampu melakukan kegiatan penanganan korban bencana alam termasuk mengevakuasi atau menyelamatkan korban ke tempat yang aman dengan langkah-langkah yang disesuaikan dengan bencana yang terjadi dan berdasar SOP yang telah disusun. Sebaliknya kegiatan yang bersifat untuk memperkuat habitasi masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi pada fase pra bencana masih belum banyak dilakukan. Pada pasca bencana, meskipun sebagian besar kapasitas KSB dalam penanggulangan bencana alam khususnya penanganan korban bencana alam berkategori mampu namun kegiatan pendampingan sosial-psikologis bagi korban bencana masih belum banyak dilakukan. Kegiatan melakukan pendampingan social pemulihan social-psikologis bagi korban bencana alam

yang mengalami masalah psikis seperti trauma, duka mendalam, dan stress karena kurang bisa menerima kenyataan bencana yang telah terjadi belum sepenuhnya dilakukan. Hal berkait masih belum maksimalnya bintek atau diklat yang mereka peroleh dari sejumlah *stakeholder*, khususnya, dinas social yang lebih memfokuskan pada materi tanggap darurat.

Berkenaan dengan kondisi sarana dan prasarana/ perlengkapan penanggulangan bencana alam yang dimiliki kelima KSB tersebut, seyogyanya dibutuhkan pengembangan pengadaan sapras KSB yang tidak hanya sebatas pada lumbung social dan gardu social sebagaimana tercantum dalam aturan tata syarat dan tata cara dalam Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Nomor 193/LJS/X/2011 tentang Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana. Pengembangan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana (sapras) penanggulangan bencana di setiap KSB ini mencakup juga alat transportasi, komunikasi dan logistik yang sesuai dengan kebutuhan, jenis bencana, cakupan bencana, intensitas bencana, dampak bencana, dan waktu. KSB di daerah rawan bencana banjir, selain memiliki gardu social dan lumbung social, perlu memiliki standar peralatan penanggulangan bencana banjir seperti perahu (karet dan bermesin), pelampung, mesin pompa/penyedot air, tandu, skop/arco/bronjong, gergaji mesin, mesin fogging. Ditambah peralatan minimal bencana yang harus tersedia diantaranya lampu, tenda, mantel, sepatu bot, kabel, tikar, genset, tali/tambang, dapur umum, alat komunikasi dan transportasi untuk penyelamatan dan pendistribusian barang bantuan (sepeda motor, dll), HP/HT. radio, televisive, sirine, bendera peringatan, senter, dan peralatan pertukangan.

Berkenaan dengan pengelolaan logistic. *Pertama*, setiap KSB seyogyanya memiliki sarana dan prasarana penanggulangan bencana seperti lumbung sosial dan gardu social yang berfungsi sebagai tempat penampungan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan korban bencana, baik yang berupa barang konsumsi (habis pakai) seperti sembako dan obat-obatan maupun barang logistic non konsumsi seperti pakaian dan peralatan rumah tangga/pribadi.

Termasuk ketersediaan dana operasional dan pemeliharaan lumbung dan gardu sosial KSB. *Kedua*, bentuk bantuan logistic yang disalurkan dari Kementerian Sosial/dinas sosial/instansi terkait kepada KSB seyogyanya berwujud non barang yang dimasukkan kedalam rekening KSB. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa KSB sebagai ujung tombak penanganan bencana di tingkat *bottom up* lebih mengetahui kebutuhan korban bencana; Bencana yang bersifat *unpredictable*/mendadak menuntut respon yang sangat cepat dalam pengadaan logistik, maka pengadaan dan pendistribusian logistik oleh KSB dalam kerangka kearifan lokal akan mengurangi hambatan geografis, transportasi, serta mengurangi penderitaan korban bencana karena lebih tepat waktu, tepat sasaran, kuantitas dan kualitas, serta mengurangi biaya pengiriman. *Ketiga*, seyogyanya diselenggarakan bimtek tentang pengelolaan logistik di setiap KSB yang diberikan langsung kepada regu/tim Logistik yang dibentuk dan dimiliki setiap KSB. Diklat pengelolaan logistik ini dimaksudkan untuk mencetak kader logistik KSB yang terampil, terlatih, dan cekatan pendistribusian bantuan terhadap korban bencana alam.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Garut, Camat Cisompet, Kepala desa Sukanegara, dan KSB Tunas Bangsa atas partisipasinya sehingga penelitian ini dapat berlangsung sesuai rencana.

Daftar Pustaka

- Aprillia theresia, dkk. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan bagi Praktisi. Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Bevaola Kusumasari.(2014). *Managemen Bencana dan kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media
- David dan Alexander dalam Özerdem dkk.:2006, dikutip Damayanti Wardyaningrum. (2016). *Modal Sosial Inklusif Dalam Jaringan Komunikasi Bencana*.

- Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 1, Juli 2016
- Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (2011). *Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana* (KSB). Jakarta: Kementerian Sosial.
- Gatra. (2012) *Alam Terkembang Ibarat Guru: Kearifan Lokal Membaca Bencana*. (2012). Jakarta: 23 Mei 2012
- Gunawan, dkk. (2009). *Studi Evaluasi tentang Penanggulangan Bencana Alam Peran Tagana dalam Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat untuk Mengurangi Resiko Bencana Alam*. Jakarta: P3KS Press.
- Gunawan (2009). *Kebutuhan Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana Alam di Sumatera Barat*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol. 14, No. 03, September, 2009
- Gunawan.(2016).*Kampung Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana*. Naskah ini pernah disampaikan dalam Seminar Nasional Penguatan Ketangguhan Berbasis Masyarakat Dalam Mitogasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim, pada tanggal 30 November 2016 di Pusat Penelitian Geoteknologi Bandung (Kerjasama LIPI dan BNPB).
- Kamadhis UGM. 2007. Eka-Cita Bersatu dalam Dharma. *Buletin Kamadhis UGM Nomor.XXVII/September/2007*. Kamadhis UGM, Yogyakarta.
- Kementerian Sosial RI. (2011). *Pedoman Umum, Tim Reaksi Cepat (TRC)*. Jakarta: Kementerian Sosial
- Kelly.C. (1995). A. Framework for Improving Operational Effectiveness and Cost Efficiency in Emergency Planning and Response. *Disaster Prevention and Management*
- Khotami bahri dan Saeful Alam Elbarnaz. (2005). *Keajaiban Dibalik Tragedi Tsunami Aceh*. Bogor: Pancasona
- Muhammad Belanawane S. (2015). *Kampung Siaga Bencana Sebagai Instrumen Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Indonesia: Politik Pembangunan dan Partisipasi Dalam*

- Diskursus Pembangunan Kebencanaan*. Puslitbang Kesos, Kementerian Sosial RI. Sosio Konsepsia Vol. 5, No. 01, September - Desember, Tahun 2015
- Mukhtar dan Erna Widodo. (2000). *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz.
- Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurjanah, dkk. (2014). *Managemen Bencana*. Bandung. Afabeta
- Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro. (2010). *Manajemen Bencana*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Priambodo, S.A. (2009). *Panduan Praktis Mengatasi Bencana*. Yogyakarta: Kanisius.
- Robert J. Kodoate dan Rustam Syarief. (2006). *Pengelolaan Bencana Terpadu*. Jakarta: Yarsif Watampane
- Soehatman Ramli. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*. Jakarta; Dian Rakyat
- Sri Prastyowati, dkk. (2012). *Implementasi Sistem Jaringan Kerja dalam Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Alam*. Yogyakarta: B2P3KS Press
- Sunit Agus Tri Cahyono. (2011). *Kajian Faktor Penyebab dan Dampak Sosial Bencana Banjir Wasior*. Yogyakarta: B2P3KS Press
- Sriadi Setyawati, Dyah Respati Suryo Sumunar (2014). Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Baduy. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 19, No.1, April 2014
- Suparmini, dkk (2013). *Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Baduy*. Yogyakarta: UNY
- Teti Ati Padmi, dkk (2013). *Studi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam Berbasis Masyarakat*. Jakarta: P3KS Press.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

